

BAB V

PENUTUP

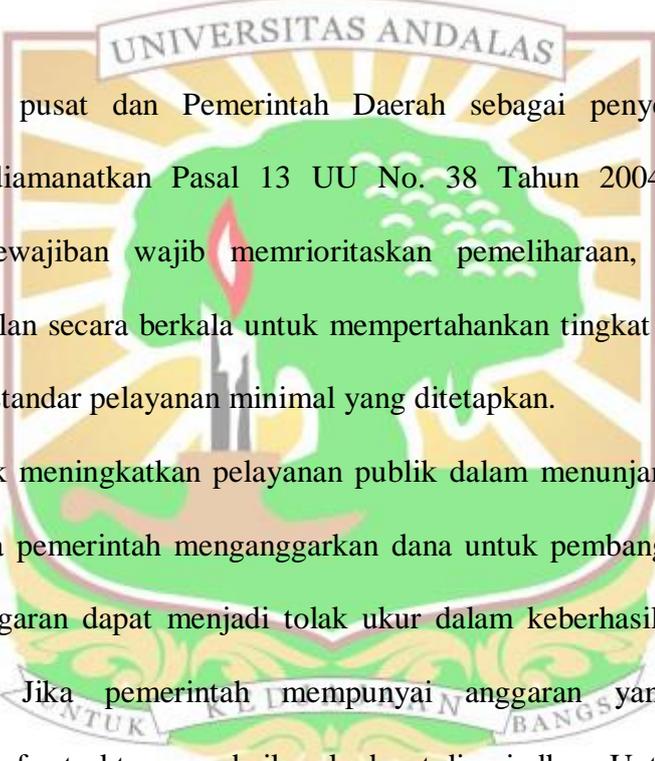
5.1 Kesimpulan

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan infrastruktur adalah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, menyebabkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan pembangunan jalan umum dan jembatan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan dan jembatan:

1. Pemerintah pusat dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur ataupun Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat specific grant (bantuan spesifik).
2. Dalam perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan serta jembatan, Penyelenggara Jalan (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) harus

memperhatikan dan mengacu pada UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan teknis lainnya yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pembangunan jalan (termasuk jembatan).



Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana diamanatkan Pasal 13 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan mempunyai kewajiban wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Demi untuk meningkatkan pelayanan publik dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan dan jembatan. Anggaran dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu proyek pembangunan. Jika pemerintah mempunyai anggaran yang baik maka pembangunan infrastruktur yang baik pula dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan pembangunan yang baik tersebut maka anggaran dapat mempunyai fungsi sebagai alat perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pemerintah wajib mencakup menentukan tujuan digunakan anggaran untuk pembangunan, pengembangan kondisi lingkungan agar tujuan tersebut dapat dicapai, pemilihan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, penentuan langkah-langkah untuk menerjemahkan rencana menjadi kegiatan yang sebenarnya, melakukan

perencanaan kembali untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi. Untuk melakukan perencanaan diatas maka perlu pengawasan terhadap pembangunan agar penggunaan anggaran tidak melenceng seperti yang direncanakan sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Payakumbuh sebaiknya mulai mengurangi tingkat ketergantungan penerimaan DAK terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur, misalnya dengan mengefektifkan penerimaan retribusi dan pajak daerah.
2. Adanya beberapa perubahan anggaran dari pagu anggaran yang telah ditetapkan dari tahun sebelumnya serta ditambah adanya penambahan pembangunan infrastruktur lainnya, sebaiknya dinas pekerjaan umum kota Payakumbuh melakukan internal audit untuk mengetahui penyebab adanya peningkatan pengeluaran dalam pembangunan jalan dan jembatan. Hal tersebut untuk menelusuri apakah peningkatan pengeluaran tersebut dikarenakan belanja yang semakin besar, atau faktor eksternal misalnya harga bahan baku pembangunan infrastruktur yang semakin besar, atau pengaruh nilai tukar rupiah yang tidak stabil.
3. Banyaknya kerusakan jalan dan jembatan yang terjadi hampir setiap jalan dan jembatan di kota Payakumbuh, Pemerintah dianggap gagal membangun jalan dan jembatan sesuai standar teknisnya. Untuk itu,

perlu segera dilakukan *engineering audit* terhadap penyelenggara jalan. Kerusakan struktural jalan dipengaruhi tiga faktor penting, yaitu: Pertama, kendaraan berat dengan muatan lebih (*overloading*); Kedua, kondisi drainase permukaan jalan; dan Ketiga, mutu pelaksanaan konstruksi jalan.

